

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal merupakan salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian diperkotaan, usaha sektor informal tidak resmi dan biasanya dimiliki oleh usaha yang berukuran kecil. Contoh dari kegiatan usaha yang tidak resmi meliputi pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, tukang becak, dan lainnya. Di dalam bidang ini, tidak ada lembaga yang mengawasi aktivitas mereka, regulasi belum terdefinisi dengan jelas, dan kegiatan ini masih dianggap ilegal. Bagi penduduk desa yang bermigrasi ke perkotaan dengan modal terbatas dan keterampilan yang terbatas, sektor usaha yang tidak resmi menjadi opsi yang menarik. Namun, penting untuk dicatat bahwa mayoritas dari mereka terlibat dalam pedagang kaki lima. (PKL) (Octaviani & Puspitasari, 2022)

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima dengan wali kota Yogyakarta bahwa pedagang kaki lima di kota Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, Pedagang kaki lima sebagai salah satu komponen utama yang ikut terlibat dalam usaha mikro maupun usaha sektor informal, dalam menghadapi sebuah lingkungan yang kurang kondusif faktor eksistensi menjadi penghambat dalam perkembangan suatu

bisnis. Pekerjaan pada pedagang kaki lima ini sangat tersedia untuk anggota masyarakat berpendidikan rendah serta pengalaman dan keterampilan yang begitu terbatas. Usaha kecil ini termasuk bagian dari suatu kehidupan sehari-hari masyarakat diseluruh belahan dunia, usaha kecil juga bisa menunjang kemudahan hidup konsumen dan berpengaruh besar pada lapangan kerja serta peningkatan ekonomi suatu negara. (Puspitasari, 2010)

Selanjutnya, keberadaan pedagang kaki lima tidak hanya berada di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota diindonesia, beberapa kota di benua Asia, Eropa dan Amerika latin juga dipenuhi oleh kegiatan pedagang kaki lima (PKL), Oleh karena itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan perkotaan. Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah telah mengakui keberadaan pedagang kaki lima kreatif (PKL). Tumbuh dan berkembangnya pedagang kaki lima di Palu tidak hanya di kondisikan oleh terbatasnya kesempatan kerja dari tahun ke tahun, tetapi juga oleh dinamika perkembangan di kota Palu baik sebagai suatu pusat pelayanan pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan dan jasa. (Kasim et al., 2021)

Salah satu pedagang kaki lima yaitu berada di mumbai, dimana terdapat bagian pekerja wiraswasta yang paling kekurangan. Kehidupan kerja vendor dijelaskan dalam hal keuangan pada kondisi dan besarnya hutang, jumlah suap yang harus dibayarkan untuk mempertahankan diri di pasar, jam kerja , masalah pemanfaatan ruang publik, dan aspek hukum dari

kegiatan. Itu telah terlihat dari studi bahwa seluruh keberadaan dan sifat kegiatan sangat luar biasa informal dan berbasis kepercayaan. PKL meminjam dari rentenir tidak semata-mata untuk kegiatan ekonomi tetapi juga untuk tujuan jaminan sosial dengan harga selangit suku bunga, yang, pada gilirannya, membawa jatuh ke dalam situasi perangkap utang. Pedagang kaki lima diidentifikasi sebagai pekerja wiraswasta di sektor informal yang menawarkan hasil dagangannya tenaga kerja untuk menjual barang dan jasa di jalan tanpa memiliki struktur bangunan permanen. (Saha, 2011)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan destinasi tujuan wisatawan lokal maupun asing dan tujuan selanjutnya setelah Bali di Indonesia. Berbagai kemampuan daya tarik wisata terdapat di provinsi ini baik itu alam, budaya serta minat khusus. Pariwisata bagi DIY sudah seperti "denyut nadi" dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai sumber mata pencaharian. Objek wisata alam, bangunan bersejarah, dan tempat berwisata lainnya yang berada di provinsi ini sudah mengalami kemajuan sehingga dapat mengimbangi wisata budaya yang ada.

Alun-alun selatan (Alkid) Yogyakarta adalah sebuah lapangan terbuka yang terletak di bagian belakang istana kraton, memiliki ukuran 160x160 meter. Alun-alun Selatan dirancang untuk menjaga arah pandang kraton agar tidak menghadap ke laut selatan, berbeda dengan alun-alun utara yang memiliki kegiatan ritual tertentu pada awalnya. Pada awalnya, Alun-Alun Selatan tidak memiliki kegiatan ritual khusus. Namun, seiring

berjalannya waktu, alun-alun ini digunakan sebagai tempat latihan baris bagi prajurit kraton dan latihan perang. Latihan baris biasanya dilakukan satu hari sebelum perayaan grebeg dan hingga saat ini kegiatan ini masih berlangsung. Selain itu, Alun-Alun Selatan juga digunakan sebagai tempat sowan abdi selama bulan puasa. Beberapa kegiatan lain yang pernah diadakan di Alun-Alun Selatan, seperti latihan memanah untuk prajurit atau keluarga kraton, sudah tidak lagi dilakukan.. (Randi et al., 2021)

Definisi bisnis adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan syarat bahwa pertukaran tersebut harus saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Konsep awal bisnis bisa disimpulkan sebagai "pembelian dan penjualan barang dan jasa." Bisnis melibatkan interaksi langsung antara berbagai pihak yang membutuhkan satu sama lain, menciptakan peluang untuk keterlibatan internasional, dan berkontribusi pada pemeliharaan standar hidup yang layak. Tujuan utama bisnis adalah untuk mencapai keuntungan guna memenuhi kebutuhan individu, mendukung pertumbuhan sosial, dan menjalankan tanggung jawab sosial. Berbagai tujuan bisnis ini sering menjadi motivasi awal bagi individu dalam memulai usaha bisnis. Selain itu, teori etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Ethos" yang merujuk pada kebiasaan dan moral, juga berperan penting dalam membentuk pemahaman tentang etika dalam interaksi antarindividu dan dalam kelompok. Nilai atau aturan hidup yang baik juga termasuk kategori etika, segala sesuatu yang dianut dan diwariskan secara turun menurun. (Zulfikar, 2020)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merujuk pada jenis usaha yang didirikan oleh individu berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Meskipun banyak orang berpikir bahwa UMKM hanya memberi keuntungan kepada sejumlah kecil individu, kenyataannya UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM memiliki kapasitas untuk memberikan pekerjaan kepada banyak orang yang masih belum memiliki pekerjaan, dan mereka juga menggunakan sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum dimanfaatkan secara komersial. UMKM mempunyai kriteria dan ciri seperti jumlah usaha dan omset dari kegiatan yang di hasilkan, orientasi, dan manajemen SDM. Dengan demikian UMKM dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UMKM, sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing individu. (Ghozali, 2021)



Sumber : Kompasiana.com

GAMBAR 1.1

Usaha Makro, Kecil Menengah (UMKM)

Menurut paramitha ND., (1967) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perusahaan besar dan usaha kecil di negara lain. Berikut adalah beberapa ciri khas UMKM:

1. Ukuran usaha kecil ini mencakup modal, tenaga kerja, dan orientasi pasar yang terbatas.
2. Banyak UMKM berlokasi di desa, kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar.
3. UMKM umumnya dimiliki oleh individu atau keluarga.
4. Tenaga kerja biasanya berasal dari lingkungan sosial dan budaya tertentu (misalnya, kelompok etnis atau geografis) yang direkrut melalui berbagai metode, termasuk rekomendasi dan perekrutan pihak ketiga.
5. Pola kerja UMKM seringkali bersifat paruh waktu atau dijalankan sebagai usaha sampingan selain dari aktivitas ekonomi lainnya.
6. UMKM memiliki keterbatasan dalam adopsi teknologi, manajemen bisnis, dan administrasi yang umumnya sederhana.
7. Struktur permodalan UMKM terbatas, sering mengalami kekurangan modal kerja, dan sangat bergantung pada sumber modal mereka sendiri dan lingkungan pribadi.
8. Banyak UMKM tidak memiliki izin usaha yang diperlukan, dan seringkali tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendukung UMKM. Minimal ada tiga tahap yang harus dipenuhi sebelum UMKM dapat beroperasi sebagai syarat ekonomi rakyat.

Sementara Uni Eropa memiliki kebijakan ekspor yang berbeda untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup:

1. Menerapkan sistem administrasi dengan aturan bisnis yang lebih sederhana.
2. Memperbaiki sistem keuangan yang mendukung lingkungan bisnis UMKM.
3. Memberikan layanan informasi yang lebih baik untuk membantu UMKM dalam strategi ekspansi ke pasar Eropa dan internasional.
4. Meningkatkan daya saing UMKM, memperbaiki akses yang diperlukan, serta memberikan dukungan dalam hal penelitian, pengembangan, dan pelatihan.
5. Memberikan panduan kepada para wirausaha dan mendukung secara khusus kelompok bisnis yang menjadi target dari kebijakan ini.

Mengenai UMKM yang bisa bertahan ditengah situasi ekonomi yang sulit serta UMKM yang bisa improve dalam situasi tersebut dikarenakan mempunyai sebuah alasan yaitu, pertama sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa jasa Dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang sangat rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri serta tidak mendapat modal dari bank. Ketiga, dengan adanya ekonomi yang berkepanjangan bisa menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan

usah yang berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat. (Ade Raselawati , 2011)

TABEL 1.1
Perkembangan UMKM Indonesia tahun 2015-2019

Tahun	UMKM		Tenaga Kerja	
	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
2015	59.262.772	99,99	123.229.387	96,71
2016	61.651.177	99,99	112.828.610	97,04
2017	62.922.617	99,99	116.431.224	96,82
2018	64.194.057	99,99	116.978.631	97,00
2019	65.465.497	99,99	119.562.843	96,92

Sumber : kementerian koperasi dan UMKM

Berdasarkan Tabel 1 sepanjang tahun 2015 hingga 2019, secara umum jumlah UMKM di Indonesia menguasai 99,99 persen pangsa pasar dan sebesar 97 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM yang ada. Dari informasi tersebut, UMKM memiliki potensi untuk menjadi salah satu sektor yang dapat berkembang serta dapat menjadi salah satu opsi lapangan kerja di Indonesia. Untuk mengembangkan dan memperluas UMKM dibutuhkan modal, sehingga pemerintah melalui bank menyalurkan kredit UMKM. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, kredit UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. UMKM yang berada di pulau Jawa menerima kredit UMKM lebih dari 50 persen dari seluruh kredit UMKM yang dikeluarkan untuk seluruh daerah di Indonesia. (Juniarto & Muchlisoh, 2021)

TABEL 1.2

Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2015-2019)

No	Tahun	PDB Atas Dasar Harga Konstan / Rp	PDB Atas Dasar Harga Berlaku / Rp
1	2015	1.655.430.000.000.000	6.228.285.000.000.000
2	2016	5.171.063.600.000.000	7.009.283.000.000.000
3	2017	5.445.564.400.000.000	7.820.282.600.000.000
4	2018	5.721.148.100.000.000	9.062.581.300.000.000
5	2019	7.034.146.700.000.000	9.580.762.700.000.000

Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara konsisten memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB dalam harga konstan mencapai Rp 7.034,1 triliun pada tahun 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 22,9% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5.721,1 triliun. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB dalam harga berlaku mencapai Rp 9.580,8 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 9.062,6 triliun.

Tidak hanya itu, UMKM di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, dengan menyediakan pekerjaan bagi 119,6 juta orang atau setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Angka penyerapan tenaga kerja ini mengalami peningkatan sebesar 2,21% sejak tahun 2018. Kontribusi UMKM yang signifikan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yaitu sebanyak 64,2 juta unit atau 99,99% dari total unit

usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu adalah Usaha Menengah (UM). Sementara itu, Usaha Besar (UB) hanya mencapai 5,5 ribu unit atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia, dan mereka menyerap sekitar 3,6 juta pekerja, yang merupakan sekitar 3% dari total tenaga kerja di Indonesia. (*Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkat*, 2021)

TABEL 1.3

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, Tahun 2015-2019

No	Tahun	Tingkat Pengangguran di Indonesia 2015-2019
1	2015	6.18
2	2016	5.61
3	2017	5.5
4	2018	5.34
5	2019	5.28

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2019 cenderung menurun. Meski demikian, masih belum mencapai misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dimana menjadikan tingkat pengangguran di Indonesia berada dibawah angka 5 persen. Sehingga pemerintah masih berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran salah satu caranya adalah dengan pengembangan Usaha Miko, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Neil Gunningham mencatat ada beberapa hal yang perlu hal yang perlu pemerintah dalam membuat regulasi untuk memfasilitasi UMKM yaitu : Pertama, terkait dengan kebijakan pembiayaan, pemerintah harus memberikan fasilitas pembiayaan yang pembayarannya menggunakan prinsip saling menguntungkan, antara lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan non bank dengan melihat kemampuan pembayaran UMKM. Kedua, pemerintah harus mensupport UMKM dalam berkomitment untuk bekerja keras dan menjadi sukses dengan mengandalkan kemandirian, kemandirian yang di maksud adalah bentuk kedisiplinan dalam inspeksi diri dan self auditKetiga, UMKM perlu didorong untuk mengadopsi praktik profesional yang umumnya ditemukan dalam perusahaan besar, dengan cara menggabungkan tujuan inti perusahaan dengan perubahan budaya kerja dalam UMKM. Keempat, pemerintah seharusnya memberikan insentif yang beragam untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Kelima, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari pelanggaran dalam operasi UMKM, dan pendekatan dalam pengawasan ini seharusnya lebih persuasif dan berorientasi pada pembinaan. Keenam, pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada satu solusi yang sempurna untuk semua masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian berkait pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul, kota Yogyakarta. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN**

PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KIDUL, YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul yogyakarta ?
2. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul, yogyakarta?
3. Apakah Jam Kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul yogyakarta?
4. Apakah modal usaha, lama usaha, jam Kerja, terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berikut rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jam Kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul, Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja dan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun alun kidul, yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, antara lain:

1. Bagi PKL

Membantu PKL dalam meningkatkan pendapatan usahanya dengan memperhatikan berbagai faktor yang di sertakan dalam sebuah penelitian ini, sehingga untuk ke depannya dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

2. Bagi Pembaca

Membantu pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai PKL dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatannya.

3. Bagi Penelitian

Selanjutnya sebagai dasar agar penelitian selanjutnya bias menyempurnakan keterbatasan yang ada di dalam skripsi ini.

4. Bagi Akademika

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan rujukan bagi para akademika maupun penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

5. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan /evaluasi oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar alun alun selatan dapat dijadikan sentra ekonomi yang saling menguntungkan.

6. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan barang dan jasa yang menyebabkan semakin meningkatnya pendapatan daerah.

E. Batasan masalah

Penulis membatasi ruang lingkup agar penelitian ini tepat sasaran. Dalam penelitian ini hanya akan membahas agar lebih terarah sehingga tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian pedagang kaki lima
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner
3. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan pendapatan ekonomi.